

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

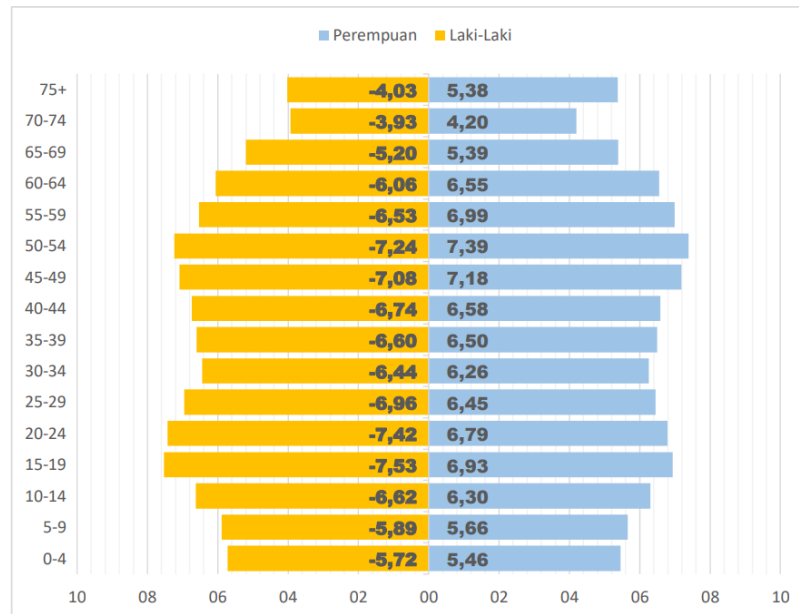
2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri atau lebih dikenal dengan sebutan Kota Gaplek merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 190.432 Ha atau 5,85% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah, (P. Wonogiri, 2023). Secara administratif Kabupaten Wonogiri memiliki 25 kecamatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonogiri adalah wilayah perbukitan dengan perbukitan kapur seluas 20% dari luas Wilayah Kabupaten Wonogiri yang mayoritas tersebar di wilayah selatan. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Wonogiri digunakan untuk lahan persawahan.

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Wonogiri

Data tahun 2021, Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri sebanyak 1.053.185 jiwa (BPS 2021) dengan 523.762 jiwa penduduk laki-laki dan 529.423 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Wonogiri 2021, kelompok usia 50-54 menjadi kelompok usia tertinggi dan diikuti oleh kelompok usia 15-19 tahun sedangkan kelompok usia terendah adalah kelompok usia 70-75. Berdasarkan piramida penduduk tahun 2021, penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dengan jumlah 717.294 jiwa, daripada penduduk usia non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas), yaitu 335.891 jiwa.

Gambar 2. 1 Piramida Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri 2021

Tabel 2. 1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Wonogiri

No.	Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laki - laki	463.590	465.124	466.051	506.793	523.762
2	Perempuan	490.437	491.982	492.848	536.384	529.423
	JUMLAH	954.027	957.106	958.899	1.043.177	1.053.185
	Rasio Jenis Kelamin	94,53	94,54	94,56	94,49	99,68

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri 2021

Dari perbandingan dua kelompok usia produktif dan non produktif tersebut dapat diketahui angka ketergantungan di Kabupaten Wonogiri tahun 2021 adalah 46,82 %. Angka ini masih berada pada kategori tinggi karena diatas 41%. rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 2017-2021 berada pada kisaran 99, artinya jumlah terdapat 99 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Berikut adalah data

penduduk untuk memudahkan dalam memahami komposisi penduduk di Kabupaten Wonogiri.

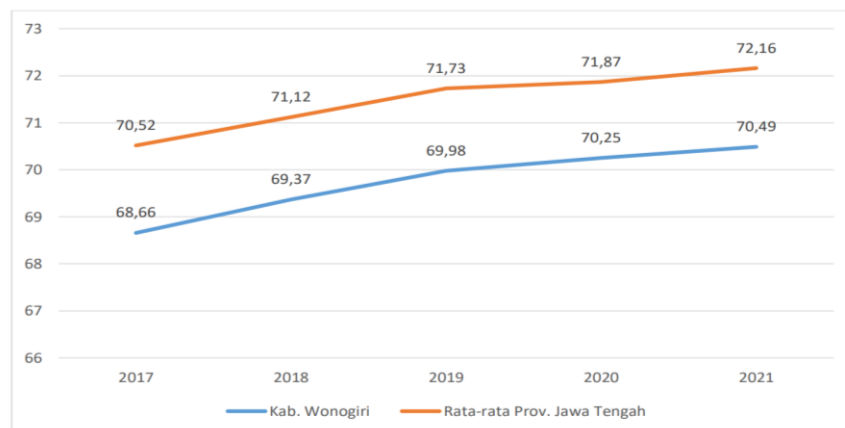
2.1.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Wonogiri

2.1.3.1 Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah gambaran kondisi masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan meliputi pendapatan, kesehatan dan pendidikan (BPS Indonesia, 2017). Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, grafik IPM Wonogiri terus naik akan tetapi masih dibawah rata-rata Jateng.

Gambar 2. 2 Grafik perbandingan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah, yaitu 72,16 tahun 2021 akan tetapi perkembangan IPM Kabupaten Wonogiri sejak awal perencanaan 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami pertumbuhan dan sedikit mengalami progress kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 karena dampak dari pandemic COVID-19 seperti table dibawah ini.

Tabel 2. 2 pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dari tahun 2017-2021

Komponen	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	76,00	76,05	76,07	76,16	76,28
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,44	12,45	12,48	12,49	12,50
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,68	6,88	7,04	7,33	7,34
Pengeluaran perkapita (d disesuaikan)	Rp000	8.765	9.117	9.426	9,286	9,429
IPM	Angka	68,66	69,37	69,98	70,25	70,49
Pertumbuhan IPM	%	0,43	0,71	0,71	0,27	0,17

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri 2022

1) Angka Harapan Hidup

Perkiraan rata-rata umur masyarakat dalam suatu daerah yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Wonogiri secara perhitungan AHH menunjukkan kondisi yang semakin baik setiap tahunnya. Angka harapan hidup pada tahun 2021 mencapai 76,28 melebihi target yang telah ditentukan dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu, tahun 2020 mencapai pada 76,16.

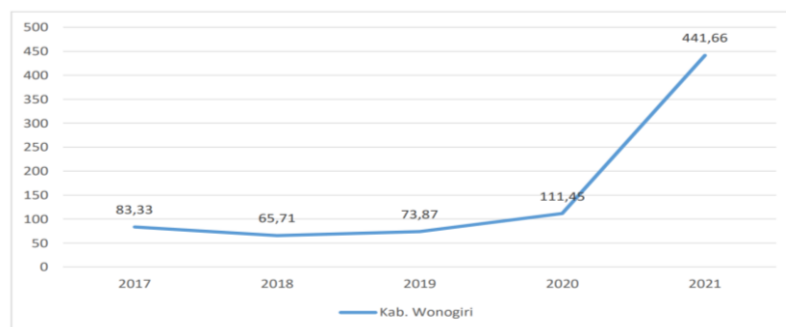
Perkembangan AHH Kabupaten Wonogiri sejak 2017 sampai dengan 2021 tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, yaitu dari 75,88 tahun menjadi 76,28 tahun, dan di atas rata-rata AHH Prov. Jawa Tengah. secara umum kualitas kesehatan Masyarakat semakin membaik berdasarkan capaian tersebut.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Perhitungan AKI digunakan untuk melihat kondisi pembangunan kesehatan di daerah tersebut, karena AKI

mencerminkan banyaknya ibu meninggal dikarenakan penyakit yang berkaitan dengan gangguan kehamilan atau kematian dalam proses penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam nifas (42 hari pasca melahirkan). Semakin rendah AKI maka tingkat pembangunan kesehatan semakin membaik di daerah tersebut.

Gambar 2. 3 Angka kematian ibu di kabupaten Wonogiri tahun 2017-2021



Sumber : Dnas Kesehatan Kab. Wonogiri tahun 2023

Pada tahun 2021 Angka Kematian Ibu Melahirkan mencapai 441,66 per 100.000 KH atau 31 ibu dari 7.019 KH, angka tersebut naik dari tahun sebelumnya di tahun 2020 sebesar 111,45 per 100.000 Kelahiran Hidup, atau 12 ibu dari 10.762 KH. Penyebab utama kematian ibu melahirkan pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan imunitas ibu hamil sehingga mudah tertular dan terinfeksi. selain kasus ibu melahirkan positif covid-19 (P. Wonogiri, 2023).

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

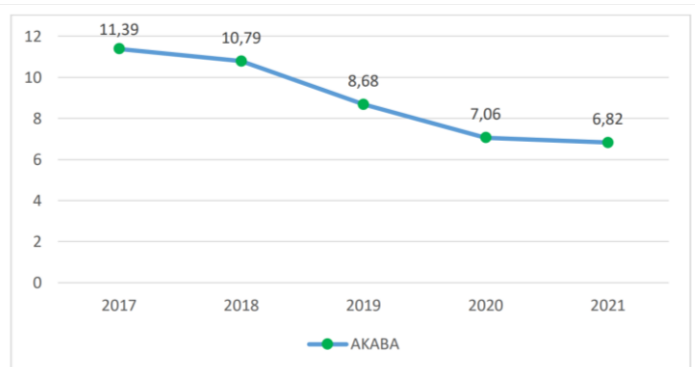
AKB adalah jumlah kematian bayi dibawah satu tahun per

1000 kelahiran hidup periode satu tahun di suatu daerah atau probabilitas bayi meninggal usia kurang dari satu tahun. Kabupaten Wonogiri tahun 2021 setiap 1000 kelahiran hidup angka kematian bayinya ada 6,89. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya per 1.000 kelahiran hidup AKB tahun 2020 yaitu 6,04. Adanya kenaikan ini merupakan dampak pandemi covid-19.

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) yaitu banyaknya kematian anak usia 5 tahun per 1000 kelahiran hidup yang dilahirkan pada tahun tertentu. Pada kurun waktu 6 tahun terakhir (2017-2021), AKABA Kab. Wonogiri menunjukkan kondisi yang semakin membaik yaitu dengan angka yang menurun.

Gambar 2. 4 Angka Kelahiran Balita periode tahun 2017-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Wonogiri 2023

Pada tahun 2017, AKABA di kabupaten Wonogiri mencapai 11,39, sedangkan pada tahun 2021 berada di angka 6,82.

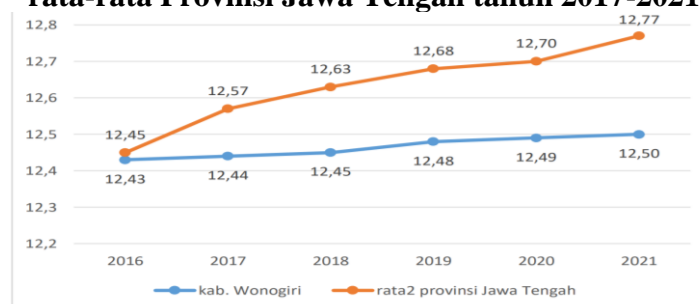
d. Kasus Gizi Buruk dan Stunting

Kasus stunting di Kabupaten Wonogiri pada periode 2017-2021 menunjukkan trend kenaikan. Terhitung pada tahun 2021 sebanyak 452 balita mengalami gizi buruk, kenaikan tersebut disebutkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu dampak dari pandemi COVID-19 akibat adanya penurunan pengawasan status gizi balita. Kasus gizi buruk Kabupaten Wonogiri tercatat sebagai yang tertinggi sewilayah Subosukawonosraten, (P. Wonogiri, 2023).

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditamatkan oleh anak sekolah di wilayah tersebut. HLS menjadi acuan untuk merealisasikan target Rata-rata lama sekolah,

Gambar 2. 5 Perbandingan HLS Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Wonogiri.

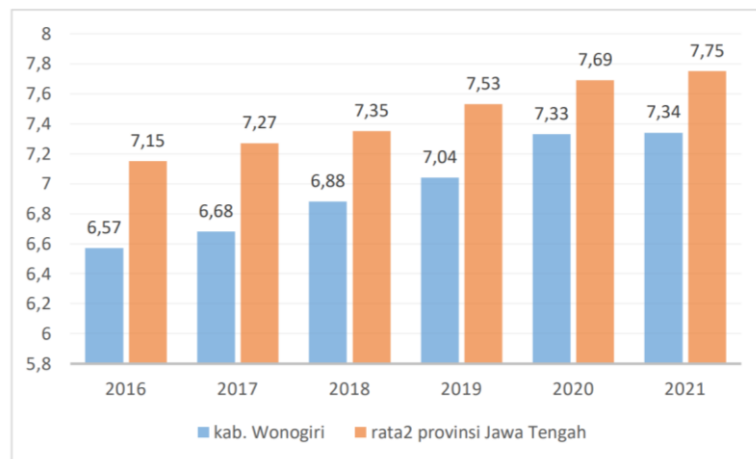
HLS Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 adalah 12,50 yang artinya diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan masa studinya sampai 12 tahun sekolah atau sampai lulus SMA. faktanya di

Kabupaten Wonogiri berdasarkan data diatas HLS mengalami kenaikan akan tetapi masih tertinggal dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan berada di peringkat ke-7 sewilayah Subosukawonosraten.

3) Rata-Rata Lama Sekolah

RLS sebagai realisasi dari HLS, rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dapat ditempuh anak sekolah di suatu daerah dalam satuan tahun. Cakupan perhitungan RLS adalah usia diatas 25 tahun. RLS di Kabupaten Wonogiri mencapai 7,34 tahun yang artinya rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas menamatkan sekolahnya sampai jenjang SMP kelas 7.

Gambar 2.6
Perbandingan RLS Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata RLS Provinsi Jawa Tengah.



Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri 2021

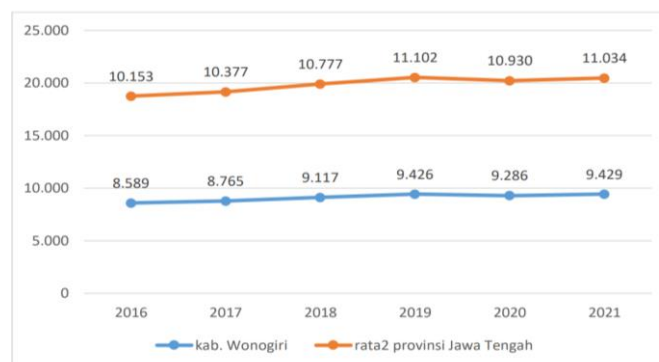
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wonogiri berada pada urutan paling terakhir jika dibandingkan dengan Subosukawonosraten dan RLS Kabupaten Wonogiri masih di bawah RLS Provinsi Jawa

Tengah. Perlu digaris bawahi bahwa gap antara harapan dan realisasi dari lama sekolah di Kabupaten Wonogiri masih terpaut sangat jauh harapannya anak sekolah dapat menyelesaikan masa studi hingga 12 tahun akan tetapi realisasinya hanya sampai 7 tahun.

4) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran perkapita merupakan rata-rata pengeluaran masyarakat atau kemampuan daya beli masyarakat selama setahun yang datanya diperoleh dari susenas. Pengeluaran perkapita Kabupaten Wonogiri tahun 2021 sebesar Rp.9.785.83 sedangkan pada akhir RPJMD 2026 ditargetkan sebesar Rp.11.585,00. Pengeluaran perkapita juga sebagai salah satu alat untuk menganalisis taraf hidup masyarakat berdasarkan pengeluaran dalam kegiatan jual beli.

Gambar 2.7
Perbandingan Pengeluaran perkapita Kabupaten Wonogiri dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kab. Wonogiri

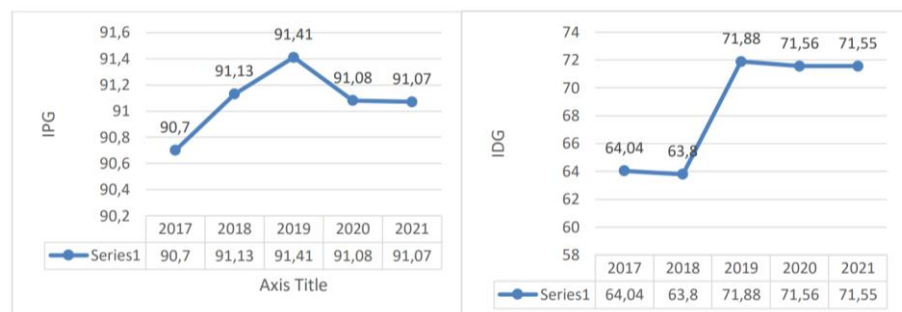
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pengeluaran perkapita di Kabupaten Wonogiri menunjukkan progress yang positif setiap

tahunnya, dari tahun 2017 dengan angka Rp 8.765,00 menjadi Rp 9.429,00 di tahun 2021. Grafik yang terus naik menandakan adanya perbaikan dalam taraf hidup masyarakat Kabupaten Wonogiri akan tetapi, ketercapaian tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Dimana tahun 2021 pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah telah mencapai Rp. 11.034,00. Walaupun secara internal daerah terus mengalami perbaikan, apabila dibandingkan dengan wilayah Subosukawonosraten, Kabupaten Wonogiri berada pada urutan terakhir.

5) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Indeks Pembangunan gender adalah Indikator yang digunakan untuk melihat ketercapaian kesetaraan gender di suatu daerah. Pencapaian kesetaraan gender dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (P. Wonogiri, 2023).

Gambar 2.8
IPG dan IDG Kabupaten Wonogiri tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dalam 6 tahun, capaian IPG pada tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang meningkat sebagaimana tersaji

pada grafik. Grafik yang terus naik menandakan pembangunan berbasis gender membaik. Capaian IDG pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan, akan tetapi kembali menurun 0,01 point pada tahun 2021. Hal tersebut menandakan pemberdayaan berbasis gender mengalami sedikit penurunan . Capaian IPG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 berada pada urutan 27 se Provinsi Jawa Tengah dan masih dibawah IPG Jateng. IDG Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 berada pada urutan 15 dan lebih rendah terhadap IDG Provinsi Jawa Tengah. Untuk melihat kondisi riil pemberdayaan perempuan, diperinci data perindikator IPG, hasilnya Pengeluaran per kapita perempuan jauh dibawah laki-laki, yaitu untuk perempuan 8.493 juta rupiah dan laki-laki 13.000 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi perempuan masih rendah dan akses ekonomi perempuan masih rendah sehingga perempuan belum bisa bersaing dengan laki-laki (P. Wonogiri, 2023).

2.2 Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten Wonogiri

BAPPEDA Kabupaten Wonogiri memiliki fungsi dalam penunjang kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan. BAPPEDA bertanggungjawab kepada Bupati Wonogiri melalui sekretaris daerah (B. K. Wonogiri, 2021).

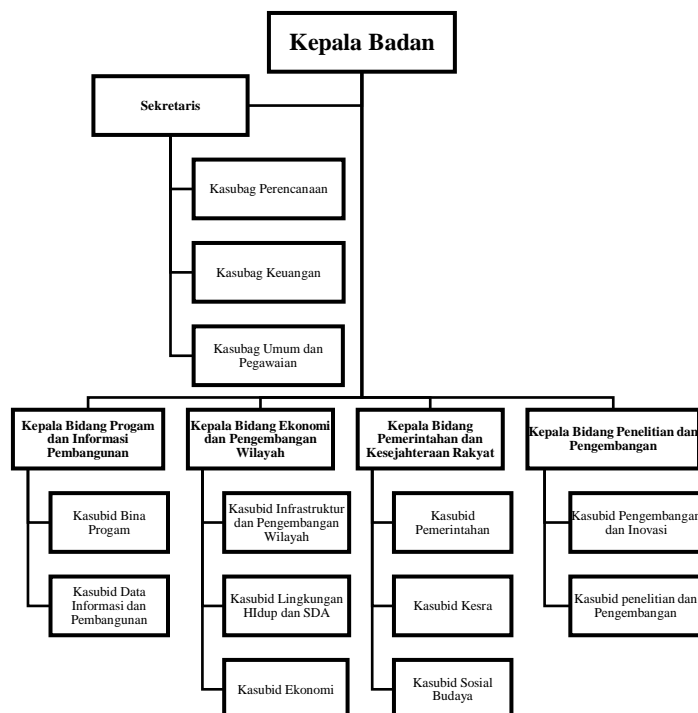
2.2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

BAPPEDA & Litbang Kabupaten Wonogiri melaksanakan fungsinya sebagai OPD penunjang urusan perencanaan yang mejadi kewenangan daerah

dan urusan penelitian dan pengembangan. Dokumen perencanaan pembangunan, dokumen perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka tahunan, adapun dokumen perencanaan teknis untuk menunjang perencanaan anggaran adalah output dari BAPPEDA, dengan uraian tugas pokok dan fungsi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Pemberian layanan konsultatif penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
3. Koordinator perencanaan program dan kegiatan pembangunan, baik yang didanai dari Pemerintah Pusat maupun maupun dari Pemerintah Propinsi.
4. Penyiapan dokumen rencana induk perencanaan sektoral. 6. Koordinator Implementasi Program Program Strategis
5. Pengembangan kegiatan kelitbang dan pengkajian, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil hasilnya

2.2.2 Struktur Organisasi



2.3 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri

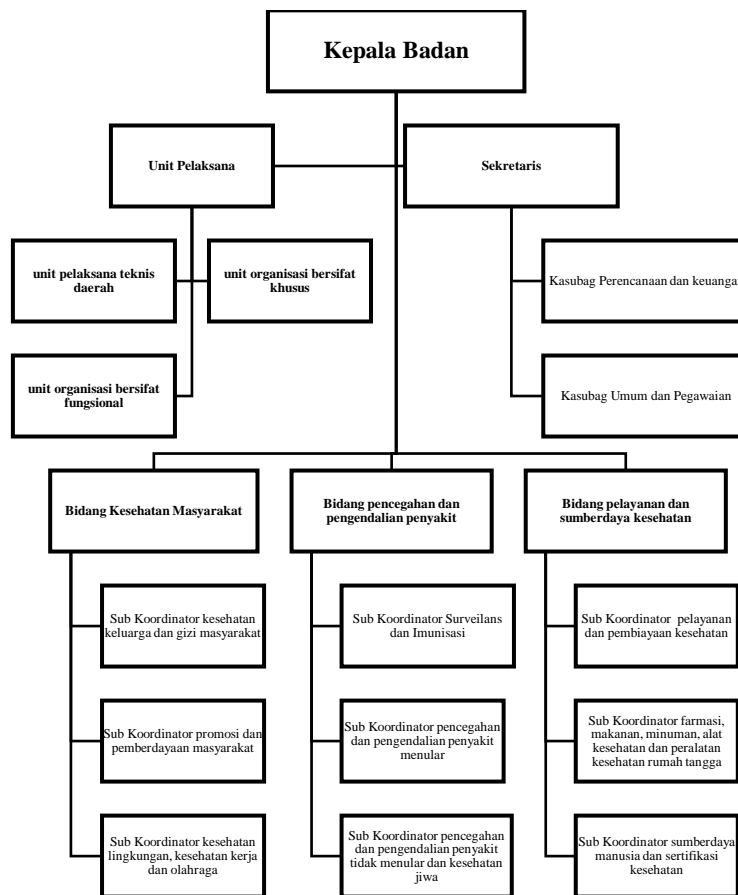
Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri adalah salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tugas utama yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten (Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, 2021).

2.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Dalam membantu pelaksanaan tugas, Dinas Kesehatan Kab. Wonogiri mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Struktur Organisasi



2.4 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri

Dinas Pendidikan dan kebudayaan merupakan OPD yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah urusan Pendidikan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bupati menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam melaksanakan tugas dalam bidang Pendidikan,

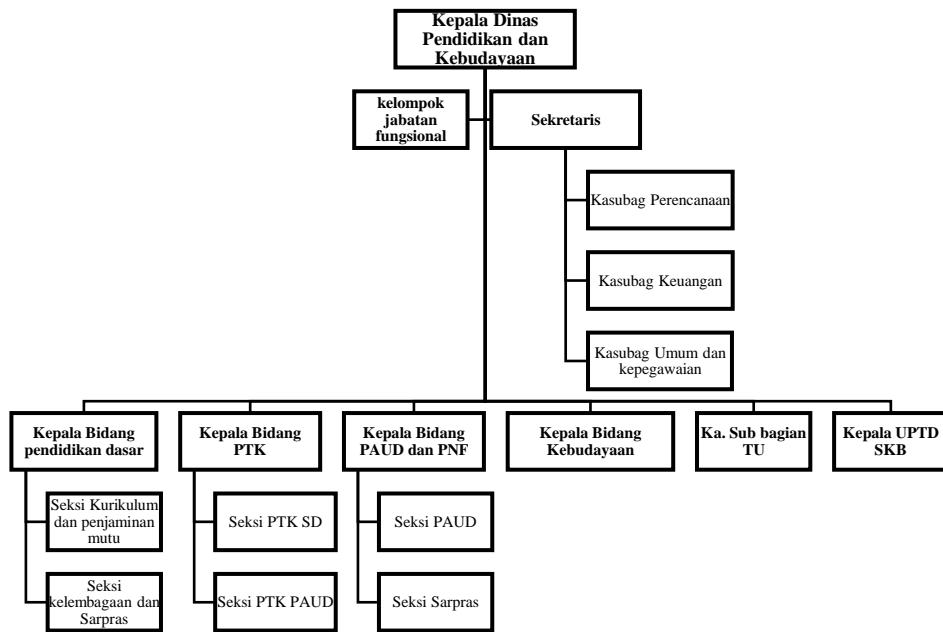
2.4.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wonogiri berdasarkan pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten

Wonogiri, berikut uraian tugas pokok dan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan ;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;

2.4.2 Struktur Organisasi



2.5 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB DAN P3A) Kabupaten Wonogiri

Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum menjalankan tugas pembantuan pemerintahan meliputi bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.5.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

DPPKB & P3A melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Wonogiri No. 90 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi DPPKB & P3A Kabupaten Wonogiri. Adapaun uraian berikut uraian tugas pokok dan fungsi :

Tugas Pokok : “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak”

Fungsi DPPKB & P3A :

1. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak lingkup kabupaten;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.5.2 Struktur Organisasi

